



### SEKILAS TENTANG PEMBANGUNAN WILAYAH PEDESAAN RENDAH EMISI (LED-R)

- Provinsi Kalimantan Timur telah dipilih oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai lokasi percontohan untuk *Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund REDD+*
- Green Growth Compact (GGC) di tingkat provinsi telah mengumpulkan pemangku kepentingan yang berbeda-beda untuk menyeleraskan komitmen, inisiatif, dan rencana kerja terkait konservasi hutan dan pembangunan berkelanjutan
- Program Kampung Iklim Nasional (PROKLIM) memberikan peningkatan kapasitas dan pendampingan teknis untuk masyarakat dalam upaya mendukung tindakan mitigasi dan adaptasi yang sesuai di tingkat lokal

#### PENDORONG DEFORESTASI

- Pertanian skala besar
- Pertanian skala kecil
- Penebangan kayu ilegal skala besar
- Industrial mining
- Infrastruktur transportasi

**EMISI TAHUNAN RATA-RATA DARI DEFORESTASI LUAS KAWASAN**  
19,74 Mt CO<sub>2</sub> (2010-2015) termasuk bio massa permukaan tanah dan dekomposisi gambut

**POPULASI**  
4.365.200 (2018)

**IPM**  
75,12 (2017)

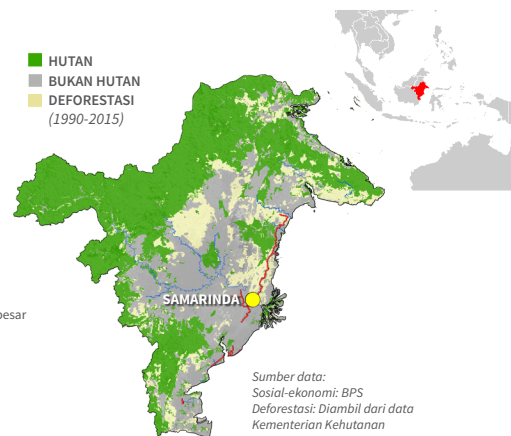
**PDB**  
USD 35,12 miliar (2016, tahun dasar 2010)

**GINI**  
0,330 (2017)

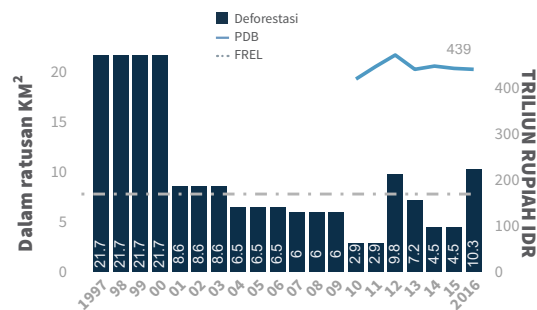
#### KEGIATAN EKONOMI UTAMA

- Ekstraksi sumber daya yang tidak dapat terbarukan
- Manufaktur dan industri lainnya
- Konstruksi

**POPULASI DESA/KOTA**  
31%/69%



Sumber data:  
Sosial-ekonomi: BPS  
Deforestasi: Diambil dari data  
Kementerian Kehutanan

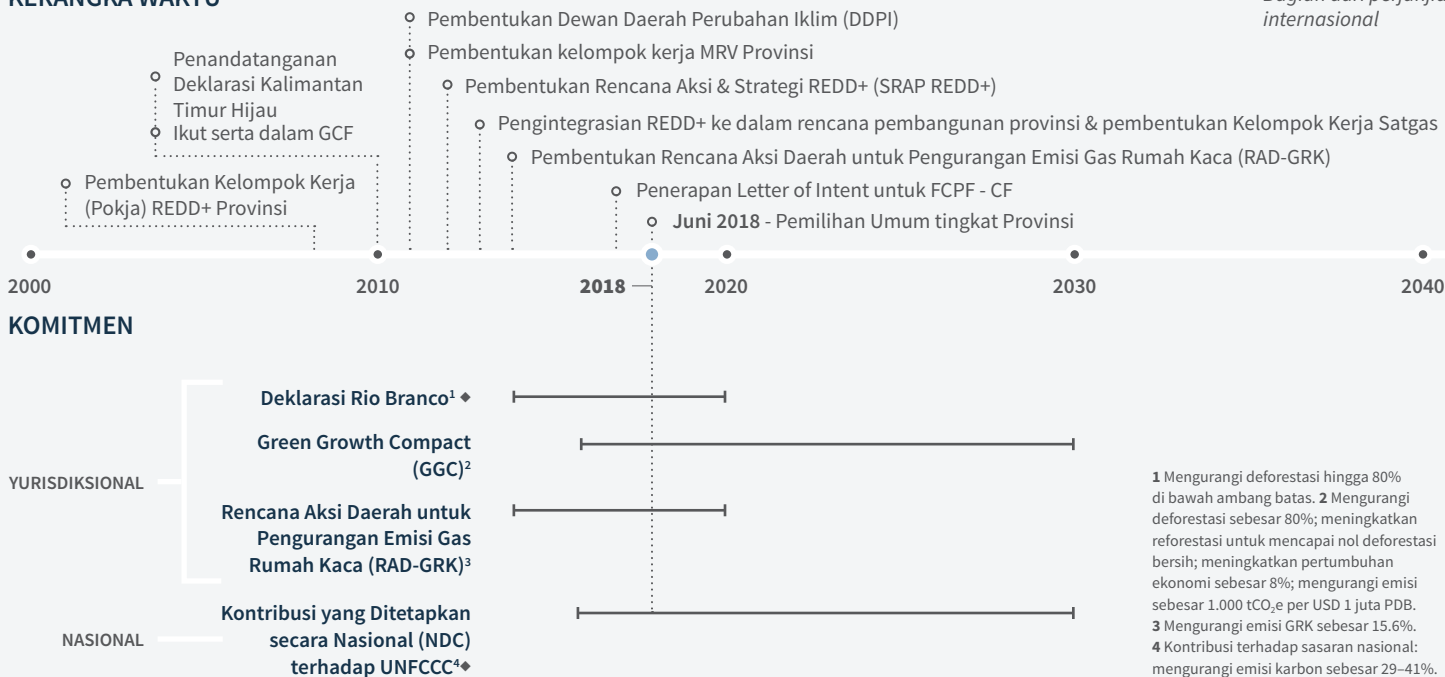


### SOROTAN INOVASI

Pada tahun 2010, pemerintah Kalimantan Timur mengokohkan komitmennya terkait pembangunan berkelanjutan dengan meluncurkan strategi **Kalimantan Timur Hijau (Green East Kalimantan)** yang berfokus pada perbaikan tata kelola sumber daya alam. Untuk mencapai tujuan dari strategi tersebut, pemerintah provinsi menyadari bahwa mereka memerlukan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan di Kalimantan Timur dan dukungan dari tingkat nasional dan internasional. Gubernur Awang Faroek Ishak meluncurkan *Green Growth Compact (GGC)* pada September 2016 sebagai alat untuk menyatukan inisiatif dari sektor swasta, pemerintah daerah & nasional, komunitas, LSM, dan universitas. Selama pertemuan tahunan Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan (GCF) tahun 2017 di Balikpapan, sebuah perjanjian ditandatangani oleh

banyak pemangku kepentingan yang berisikan tujuh prakarsa percontohan GGC yang akan dikembangkan untuk membantu mencapai tujuan-tujuan dari Kaltim Hijau, yaitu: (1) menerapkan program pengurangan emisi karbon untuk skema FCPF; (2) memperkuat upaya perhutanan sosial (menargetkan 660.782 Ha); (3) memperkuat 21 KPH; (4) memperkuat pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Wehea-Kelay untuk koridor Orangutan; (5) mengembangkan kemitraan untuk pengelolaan Wilayah Delta Mahakam; (6) mendukung visi pembangunan Kabupaten Berau (Program Karbon Hutan Berau); dan (7) mengembangkan perkebunan berkelanjutan di semua kabupaten. Sejak peluncuran strategi Kaltim Hijau, KLHK di tingkat nasional telah mendukungnya sebagai model pembangunan berkelanjutan untuk Indonesia.

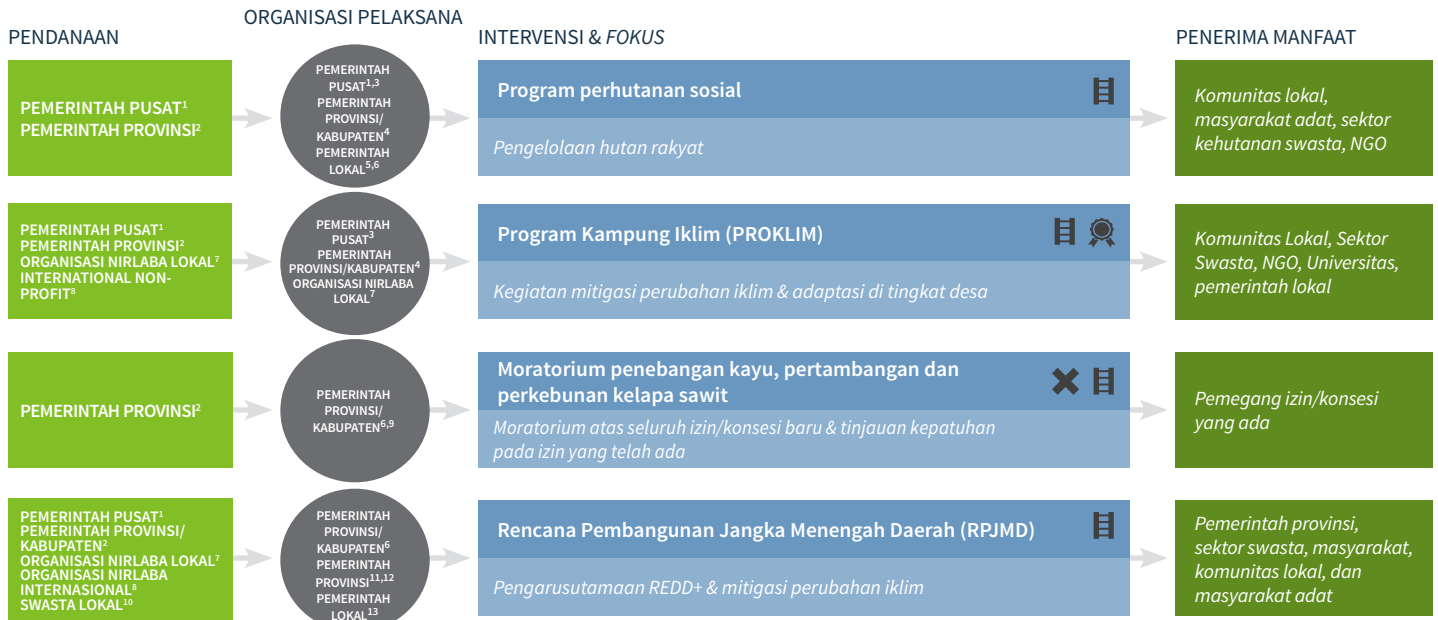
### KERANGKA WAKTU



1 Mengurangi deforestasi hingga 80% di bawah ambang batas. 2 Mengurangi deforestasi sebesar 80%; meningkatkan reforestasi untuk mencapai nol deforestasi bersih; meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%; mengurangi emisi sebesar 1.000 tCO<sub>2</sub>e per USD 1 juta PDB. 3 Mengurangi emisi GRK sebesar 15.6%. 4 Kontribusi terhadap sasaran nasional: mengurangi emisi karbon sebesar 29–41%.

# INTERVENSI UTAMA

✕ DISINSENTIF    📅 LANGKAH-LANGKAH PEMUNGKIN    🏆 INSENTIF



1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 3 KLHK. 4 Dinas tingkat Provinsi dan Kabupaten yang terkait dengan KLHK. 5 KPH, Kelompok Kerja Perhutanan Sosial. 6 Pemerintah provinsi dan kabupaten. 7 kontribusi/kelompok masyarakat. 8 pendanaan dari donor, seperti TNC, GIZ FORCLIME, WWF Indonesia. 9 Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan, Dinas Energi dan Pertambangan. 10 Dana program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). 11 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). 12 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 13 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

## PERKEMBANGAN KEBERLANJUTAN YURISDIKSIONAL

🕒 AWAL    🕒 MENENGAH    🕒 LANJUT

<b>Strategi LED-R yang Terintegrasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GGC menyatukan sekian banyak inisiatif untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam. Salah satu kegiatan awalnya adalah pengembangan SRAP REDD+</li> <li>Dengan inisiatif percontohan yang dimulai pada akhir tahun 2017, keberhasilan GGC masih belum terlihat. Komitmen politik, tantangan teknis dan pendanaan adalah hambatan untuk menerapkannya secara penuh</li> </ul>
<b>Rencana tata Ruang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP 2016-2036) meliputi perlindungan kawasan konservasi bernilai tinggi</li> <li>Beberapa regulasi terkait rencana tata guna lahan yang lebih memperhatikan Ekosistem Karst</li> </ul>
<b>Target Pelaksanaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GGC telah ditandatangani oleh 23 perwakilan dari pemangku kepentingan yang berbeda-beda untuk menyamakan inisiatif dan mempercepat visi Kalimantan Timur Hijau</li> <li>Master Plan perubahan iklim memuat arahan mitigasi dan adaptasi</li> </ul>
<b>Monitoring, Pelaporan &amp; Verifikasi (MRV)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Institusi yang akan mengelola MRV telah dibentuk dan sistemnya tengah dirancang</li> <li>Menunggu Pemerintah Provinsi dan persetujuan KLHK untuk memulai pelaksanaan</li> <li>Perlu peningkatan kapasitas dan transfer pengetahuan kelembagaan antara provinsi dengan kabupaten</li> </ul>
<b>Kebijakan &amp; Insentif</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>REDD+, perubahan iklim, dan penggunaan lahan secara berkelanjutan diarusutamakan ke dalam RPJMD &amp; RAD-GRK</li> <li>Mekanisme insentif &amp; disinsentif disertakan dalam kebijakan namun memerlukan dukungan yang lebih untuk dapat dilaksanakan</li> </ul>
<b>Tata kelola Para Pemangku Kepentingan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GGC yang dikoordinasikan oleh DDPI merangkul para pemangku kepentingan dari latar belakang yang berbeda termasuk sektor publik dan swasta, masyarakat adat, komunitas lokal, masyarakat sipil dan NGO nasional dan internasional</li> </ul>
<b>Pertanian Berkelanjutan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beberapa produk kelapa sawit telah mendapatkan sertifikasi RSPO</li> <li>Beberapa konsesi penebangan kayu berkomitmen untuk menerapkan standar keberlanjutan internasional; lainnya masih dalam proses sertifikasi oleh <i>Forest Stewardship Council</i></li> </ul>
<b>Masyarakat Adat &amp; Komunitas Lokal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem Satgas REDD+ provinsi masih dalam tahap pengembangan</li> <li>Pendekatan Pertumbuhan Hijau Desa (<i>Village Green Growth</i>) dari GGC menghormati hak-hak masyarakat adat dalam hal penggunaan lahan dan rencana pembangunan</li> <li>Persetujuan masyarakat tidak diwajibkan oleh undang-undang; konflik tenurial lahan terus terjadi antara masyarakat adat dengan perusahaan swasta</li> </ul>
<b>Pembiayaan LED-R</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembiayaan berasal dari dana APBD, NGO internasional &amp; Bank Dunia melalui proyek FCPF</li> <li>Sektor swasta turut terlibat melalui dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan</li> </ul>

**KUTIPAN** | M. Komalasari, S. Peteru, S. Atmadja, C. Chan. 2018. "East Kalimantan, Indonesia" dalam C. Stickler *et al.* (Eds.), *Keadaan Keberlanjutan Yurisdiksional*. San Francisco, CA: EII; Bogor, Indonesia: CIFOR; Boulder, CO: GCF-TF.

**REFERENSI DAN SUMBER DATA YANG LEBIH LENGKAP DAPAT DILIHAT DI** [www.earthinnovation.org/state-of-jurisdictional-sustainability](http://www.earthinnovation.org/state-of-jurisdictional-sustainability)

2018/10/15

TIM TEKNIS



DI DUKUNG OLEH



based on a decision of the German Bundestag



PROGRAM PENELITIAN PADA Hutan, Pohon da Wanatani

## TANTANGAN & PELUANG

### TANTANGAN

- Kesulitan untuk mengintegrasikan produksi kelapa sawit skala kecil ke dalam rantai pasok yang berkelanjutan
- Merosotnya harga batu bara yang berdampak pada kondisi fiskal dan PDB Kalimantan Timur
- Mengelola keberlanjutan program LED-R melalui perubahan administratif
- Kurangnya komitmen politik dan pemahaman atas visi Kaltim Hijau & arahan GGC
- Kebijakan daerah terkait perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara tidak selalu mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan hidup

### PELUANG

- Pejabat pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk mengarusutamakan LED-R ke dalam rencana pembangunan
- Acara yang dimaksudkan untuk membangun kesadaran telah menghasilkan kondisi parlemen yang semakin kondusif untuk mengatasi perubahan iklim
- Pengembangan suatu inisiatif produksi kelapa sawit yang berkelanjutan yang menyertakan praktik-praktik konservasi
- GGC menunjukkan bagaimana komitmen & kemitraan di tingkat lokal dapat menghasilkan suatu dampak global dan semoga dapat menginspirasi yurisdiksi hutan tropis lainnya